

**Penerapan SAK -ETAP  
Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan UKM**

**Sungkono  
STIE BBANK**

*The objective of financial statements are to provide information about the financial position, performance and change in financial position of an enterprise that is useful in making business decisions. The facts have shown that Small and Medium Enterprises (SME's) encounter financial reporting difficulties due to a major internal weakness in their business. One of their problems is entrepreneurs of SME's may fail to recognize the importance of financial statement and accounting information that could be utilized in decision making. Consequently, quality of financial statement that they prepared are not sufficient for many purposes. SAK-ETAP is a new product of IAI as financial accounting standard for SME's. This product is prepared more simple than general financial accounting standard (SAK) , so Entrepreneurs of SME's can apply fluently in accounting processes, and so far financial statements is prepared more useful for business decision making.*

**Keywords** : *financial statement, SAK-ETAP, SME's, business decision making.*

**1. Pendahuluan**

Usaha kecil dan menengah (UKM) mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian nasional suatu negara, termasuk Indonesia. Saat ini, menurut data dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI yang diterbitkan per Juni 2009, jumlah unit UKM yang ada di Indonesia pada tahun 2008 sebanyak 51.257.527 atau sekitar 20% dari jumlah penduduk Indonesia yang berarti setiap 1 dari 5 penduduk Indonesia mempunyai unit UKM. Selain UKM merupakan penyumbang unit usaha terbesar, unit usaha jenis ini juga menyumbang penyerapan jumlah tenaga kerja yang sangat besar yang mencapai 90.896.270 orang atau sekitar 36% dari jumlah penduduk Indonesia. Berdasarkan skala usaha yang dikelompokkan sesuai UU Nomor 20/2008 dan jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor ini sesuai kelompoknya seperti tersaji pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa jenis usaha skala mikro paling banyak jumlahnya yaitu mencapai 98,91 % dari total jumlah UKM. Penyerapan tenaga kerja juga paling banyak disumbangkan oleh skala usaha ini yang mencapai 92,03% dari keseluruhan tenaga kerja sektor UKM. Sebagai pembandingan, di Malaysia (Norsofina *et al* , 2000) jumlah unit UKM (usaha kecil dan menengah) yang ada jumlahnya mencapai 95% dari seluruh jumlah usaha yang ada. Usaha ini juga memberikan kontribusi terhadap jasa dan output nasional (*gross domestic bruto*) sebesar 20% dan penyerapan tenaga kerja sebesar 41% (Norsofina *et al*, 2000).

Tabel 1. Kondisi UKM Tahun 2008

| Kelompok   | Unit       | %       | Tenaga Kerja | %       |
|------------|------------|---------|--------------|---------|
| MIKRO      | 50.697.659 | 98,91%  | 83.647.711   | 92,03%  |
| KECIL      | 520.211    | 1,01%   | 3.992.371    | 4,39%   |
| MENENGAH   | 39.657     | 0,08%   | 3.256.188    | 3,58%   |
| JUMLAH UKM | 51.257.527 | 100,00% | 90.896.270   | 100,00% |

Sumber : Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI per Juni 2009

Selain memberikan kontribusi yang tidak kecil dalam perkembangan jumlah usaha dan penyerapan tenaga kerja, sektor UKM juga memberikan kontribusi berharga lainnya seperti mendorong perekonomian daerah, peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan karyawan, inovasi produk, kompetisi dan pertumbuhan ekspor. Dengan demikian maka pemerintah dan berbagai pihak terkait semestinya lebih memperhatikan dan mendorong sektor UKM agar tumbuh dan berkembang lebih baik lagi.

Pemerintah sudah berusaha memberdayakan sektor UKM dengan memberikan perlindungan dan kekuatan hukum melalui Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008. Melalui undang-undang tersebut pemerintah memberdayakan UKM melalui penumbuhan iklim usaha yang kondusif dalam berbagai aspek seperti : aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, aspek kemitraan, perizinan usaha, kesempatan usaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan (UU No 20 Tahun 2008).

Namun demikian, dari kenyataan dan juga didukung beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor UKM masih banyak mengalami hambatan dalam pengembangan dirinya. Salah satu hambatan yang dialami oleh UKM adalah belum memadainya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan sehingga memberikan berbagai dampak antara lain kesulitan mendapatkan pinjaman lunak dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Selain itu, banyak pelaku UKM yang belum menganggap penting informasi akuntansi (keuangan) bagi pengambilan keputusan bisnis yang mereka perlukan, padahal informasi keuangan ini menjadi faktor penting, selain informasi non-keuangan, dalam setiap pengambilan keputusan. Karena mereka menganggap laporan keuangan tidak penting, maka mereka membuat laporan keuangan seadanya atau kalau diperlukan saja, sehingga dengan laporan keuangan yang kurang memadai maka informasi keuangan yang dihasilkan juga kurang bermanfaat sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan.

Beberapa penelitian menunjukkan betapa para pelaku UKM di Indonesia belum menyelenggarakan pelaporan keuangan secara memadai sesuai standar akuntansi yang berlaku. Selain itu juga ditunjukkan bahwa mereka kurang memanfaatkan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan bisnis. Padahal secara normatif, laporan keuangan seharusnya memberikan manfaat bagi pelaku bisnis yaitu (SAK , 2009) :

- a. Sebagai laporan pertanggungjawaban keuangan bagi para pemilik (*stewardship*) atas kegiatan yang telah dilakukan selama satu periode.

- b. Sebagai dasar yang berguna dalam pengambilan keputusan (*decision usefulness*) sesuai dengan kepentingan para pihak pengguna laporan keuangan (konstituen akuntansi).

Beberapa hasil penelitian seperti yang dilakukan oleh Norsofina dan kawan-kawan pada industri manufaktur di Penang Malaysia (2000) , Eko Hariyanto dan kawan-kawan pada pedagang eceran di Kota Purwokerto (1999) serta Margani Pinasti pada pengusaha kecil di beberapa kabupaten di Jawa Tengah (Pinasti, 2001) menunjukkan bahwa pada umumnya para pelaku UKM belum menyelenggarakan pembukuan secara baik sehingga laporan keuangan yang dihasilkan pun kurang memadai. Kondisi ini memberikan dampak belum optimalnya informasi akuntansi digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka pemerintah bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan standar akuntansi yang diperlakukan khusus bagi sector usaha kecil dan menengah (UKM) dan diberi nama SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) yang akan diberlakukan resmi mulai 1 Januari 2011, meskipun para pelaku UKM dapat memulai menerapkan lebih awal pada tanggal 1 Januari 2010. Dengan diterbitkannya SAK ETAP ini diharapkan para pelaku UKM menyadari pentingnya laporan keuangan , sehingga mereka bersedia menyelenggarakan pembukuan sesuai standar yang berlaku yang pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan oleh UKM menjadi lebih berkualitas dan dapat dipergunakan baik sebagai laporan pertanggungjawaban kepada para pemilik maupun dasar pengambilan keputusan bagi para pengguna laporan keuangan.

## **2. Tinjauan Konseptual**

### **2.1. SAK ETAP**

SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang terpisah dari produk IAI yang telah ada yaitu SAK Umum (Non-UKM). SAK ini berdiri sendiri dan tidak ada acuan silang dengan SAK Umum. Penyusunan produk ini berdasarkan referensi dari IFRS for SME (*International Financial Reporting Standar for Small and Medium Enterprises*) dan PSAK umum yang berlaku. Latar belakang diterbitkannya SAK ETAP antara lain karena :

1. Konten SAK Umum terlalu kompleks untuk diterapkan oleh pelaku UKM.
2. Transaksi UKM secara umum lebih sederhana.
3. Pengguna laporan keuangan UKM lebih terbatas.
4. Sebagai fasilitasi bagi UKM agar berpeluang mendapatkan dana murah.
5. Memungkinkan dilakukannya penghitungan dengan sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip syaria'ah.

UKM yang dapat menggunakan SAK ETAP adalah UKM yang dianggap sebagai entitas tetapi tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. Sedangkan entitas ini yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada regulator pasar modal atau regulator lainnya untuk tujuan penerbitan efek

atau UKM yang menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, maka entitas ini dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan umum (non-UKM).

Entitas yang akan menerapkan SAK ETAP harus menyatakan secara eksplisit bahwa akan menerapkan secara penuh dan setiap periode harus menyajikan laporan keuangan berupa :

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Beberapa konsep dan prinsip pervasif dalam penyajian laporan keuangan yang diatur dalam SAK ETAP adalah :

1. Dasar pengukuran adalah biaya historis (*historical cost*) dan nilai wajar (*fair value*)
2. Pengukuran awal terhadap aset dan kewajiban adalah sebesar biaya perolehan , kecuali diatur lain.
3. Pengukuran selanjutnya terhadap aset dan kewajiban adalah sebesar biaya perolehan atau biaya perolehan yang telah diamortisasi.

Secara rinci, komponen laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP adalah sebagai berikut

1. Neraca  
Neraca disajikan berdasarkan klasifikasi aset dan kewajiban atau berdasarkan likuiditas. Hak minoritas disajikan sebagai bagian dari ekuitas, bukan disajikan tersendiri antara kewajiban dan ekuitas.
2. Laporan Laba Rugi  
Laporan Laba Rugi disajikan berdasarkan sifat atau fungsi beban.
3. Laporan Perubahan Ekuitas  
Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba dapat menggantikan Laporan Perubahan Ekuitas jika perubahan ekuitas hanya berasal dari : laba atau rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode lalu, atau perubahan kebijakan akuntansi.
4. Laporan Arus Kas  
Laporan Arus Kas disajikan dengan metode langsung atau tidak langsung.

Hal-hal lain yang diatur dalam SAK ETAP adalah :

1. Entitas tidak perlu menyajikan laporan keuangan konsolidasi jika :
  - a. Entitas tersebut merupakan entitas anak
  - b. Entitas induk antara atau entitas induk akhir menyusun laporan keuangan sesuai SAK ETAP.

2. Kebijakan akuntansi yang tidak diatur secara spesifik dalam SAK ETAP dapat dibuat dengan mempertimbangkan :
  - a. Perlakuan akuntansi dalam SAK ETAP untuk isu yang serupa atau terkait.
  - b. Pengaturan dalam prinsip dan konsep pervasif.

Dalam masa transisi SAK ETAP dapat diterapkan secara prospektif, tetapi masih diperkenankan pula untuk diterapkan secara retrospektif. Jika UKM telah menyusun laporan keuangan dan menerapkan SAK ETAP secara prospektif maka jika ada dampak penyesuaian akibat kebijakan tersebut akan diakui secara langsung tanpa melalui laporan laba rugi.

## **2.2. UKM/UMKM**

Penggunaan istilah UMKM mulai disosialisasikan sejak pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Sebelumnya istilah yang sering digunakan untuk segala hal yang berkaitan dengan sektor usaha kecil dan menengah ini adalah UKM. Pada sebagian besar negara-negara di dunia menggunakan istilah '*small and medium business enterprises*' atau disingkat *SMeS* untuk sektor ini.

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 maka berdasarkan skala usahanya maka sektor usaha kecil dan menengah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Usaha Mikro :  
Usaha Mikro adalah usaha perorangan atau badan usaha dengan aset tetap (diluar tanah dan bangunan) maksimal Rp 50.000.000 atau volume usaha setahun maksimal Rp 300.000.000.
- b. Usaha Kecil  
Usaha Kecil adalah usaha perorangan atau badan usaha dengan aset tetap diatas Rp 50.000.000 sampai dengan 500.000.000 atau volume usaha setahun diatas Rp 300.000.000 sampai dengan Rp 2,5 miliar.
- c. Usaha Menengah  
Usaha Menengah adalah usaha perorangan atau badan usaha dengan aset tetap diatas Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 10 miliar atau volume usaha diatas Rp 2,5 miliar sampai dengan Rp 50 miliar.

Dengan diberikannya payung hukum oleh pemerintah diharapkan peran UKM akan lebih meningkat lagi tidak hanya sekedar usaha padat karya yang menyerap tenaga kerja paling besar dibanding sektor lain (96,18% dari seluruh tenaga kerja ), tetapi juga menumbuhkan iklim berwirausaha yang sehat dan produktif, mempercepat proses pemerataan kesejahteraan, bahkan mampu mempercepat pertumbuhan perekonomian nasional.

Di sisi lain, dengan adanya UU Nomor 20/2008 maka koperasi sebagai sektor usaha yang diharapkan mampu menjadi sokoguru ekonomi nasional akan masuk sebagai jenis usaha UKM sesuai kriteria yang dipersyaratkan dalam undang-undang. Jumlah pertumbuhan koperasi memang cukup besar yang pada tahun 2008 telah berdiri koperasi sebanyak 166.155 dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 118.616 dan tidak aktif 47.539 dengan anggota

keseluruhan sebanyak 27,9 juta orang (Sumber : Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI per Juli 2009). Secara yuridis, koperasi memang telah diberikan payung hukum dengan dikeluarkan UU Nomor 25 Tahun 1992, tetapi undang-undang tersebut lebih mengatur keberadaan dan kedudukan koperasi dalam perekonomian nasional, sedangkan dalam hal-hal yang menyangkut sektor usaha koperasi juga masuk dalam ranah UKM.

### **2.3. Telaah Kritis**

#### **1. Problematika UKM**

Di tengah antusiasme masyarakat dalam menjalankan usaha sektor UKM dan semakin meningkatnya perhatian pemerintah untuk sektor ini, UKM masih menghadapi banyak masalah yang harus segera diselesaikan. Salah satu masalah serius yang dihadapi adalah kurang memadainya laporan keuangan yang dihasilkan oleh pelaku UKM, sehingga laporan keuangan tidak memberikan banyak manfaat lagi seperti yang seharusnya (*decision usefulness*). Permasalahan tersebut terjadi karena ada beberapa faktor penyebab baik internal maupun eksternal.

##### **a. Faktor Internal**

- Kurangnya kesadaran para pelaku UKM sehingga laporan keuangan masih dianggap kurang penting sebagai informasi bagi pengambilan keputusan bisnis.
- Kurang memadainya sumberdaya yang ada (karyawan bagian pembukuan/akuntansi) karena tidak mempunyai latar belakang pengetahuan akuntansi.
- Kurang memadainya pengetahuan dan pemahaman pemilik usaha/manajemen mengenai bidang akuntansi.

##### **b. Faktor Eksternal**

- Kurangnya pendidikan dan pelatihan bidang akuntansi yang diberikan oleh instansi terkait.
- Kurangnya sosialisasi dari pemerintah berkaitan dengan ketentuan/peraturan penyusunan laporan keuangan.
- Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan dari instansi terkait mengenai ketertiban dalam penyusunan laporan keuangan.

Permasalahan yang dihadapi oleh UKM memang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi pada banyak negara juga terjadi hal yang sama. Di Penang , Malaysia, misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Norsofina (2000) menunjukkan bahwa para pelaku usaha kecil dan menengah (SMe) menghadapi kendala sulitnya akses mereka untuk memperoleh pinjaman dari bank karena laporan keuangan yang disajikan dianggap kurang memadai oleh bank. Para pelaku “SMe” yang menggunakan informasi akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis baru mencakup 37% saja. Sedangkan di Indonesia, dari beberapa hasil penelitian dapat diketahui bahwa para pelaku UKM belum menggunakan secara optimal informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Hariyanto dan kawan-kawan (1999) dalam penelitiannya menemukan bahwa para pengusaha kecil dan menengah di Kota Purwokerto pada umumnya belum menggunakan informasi akuntansi dalam

pengambilan keputusan. Hanya sebagian para pedagang menengah saja yang menggunakan informasi akuntansi. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa cakupan penggunaan informasi akuntansi dipengaruhi oleh skala usaha, jenis usaha, dan pendidikan manajer. Hasil penelitian Pinasti (2001) menyebutkan bahwa para pedagang kecil di pasar tradisional Banyumas tidak menyelenggarakan pembukuan yang memadai sehingga sebagian besar pedagang pun tidak membuat laporan keuangan, sehingga pengambilan keputusan yang diambil pun tidak didasarkan pada informasi akuntansi. Pinasti juga melakukan penelitian sektor UKM pada beberapa kabupaten di Propinsi Jawa Tengah (2007) dan hasilnya menunjukkan bahwa para pelaku UKM masih mempunyai persepsi yang kurang tepat mengenai kegunaan akuntansi dan informasi akuntansi bagi kelangsungan hidup usaha mereka. Pada umumnya para pengusaha kecil di Kotamadya Surakarta, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Banyumas lebih banyak menggunakan informasi non akuntansi dalam pengambilan keputusan bisnis.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa masih banyak kendala dan masalah yang dihadapi para pelaku UKM, termasuk di Indonesia dalam berbagai hal, di antaranya adalah belum optimalnya akuntansi memberikan kegunaan bagi para pengguna baik dalam penyelenggaraan pembukuan guna menghasilkan laporan keuangan yang memadai, tetapi juga dalam penggunaan informasi akuntansi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis.

## **2. Problematika Penerapan SAK- ETAP**

Selain permasalahan belum optimalnya penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan bisnis yang disebabkan oleh berbagai faktor, para pelaku UKM juga akan menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan penerapan SAK ETAP dalam penyelenggaraan pembukuan dan pembuatan laporan keuangan. Selain karena sumberdaya manusia (karyawan dan manajer bagian akuntansi) yang umumnya minimal baik dalam jumlah personil maupun kemampuan akuntansi, SAK ETAP juga masih banyak menerapkan standar pelaksanaan akuntansi yang rumit dengan penggunaan istilah-istilah akuntansi yang pemahamannya saja memerlukan waktu dan kemampuan akademis yang cukup, belum lagi standar pelaksanaan akuntansi yang tentu saja akan lebih rumit.

Berikut ini beberapa contoh penerapan standar akuntansi untuk UKM yang ada dalam SAK ETAP :

- a. Neraca disajikan berdasarkan kalsifikasi aset dan kewajiban atau berdasarkan likuiditas; hak minoritas disajikan sebagai bagian dari ekuitas.
- b. Laporan laba rugi disajikan berdasarkan sifat atau fungsi beban.
- c. Laporan arus kas disajikan dnegan metode langsung atau tidak langsung.
- d. Aset dan kewajiban diakui berdasarkan biaya perolehan (pada awal pengukuran) dan selanjutnya berdasarkan biaya perolehan atau biaya perolehan yang diamortisasi secara garis lurus. Penyisihan kerugian penurunan berdasarkan *incurred losers* bukan *expected losers*.
- e. Investasi pada joint venture diukur dengan metode biaya bukan metode ekuitas atau konsolidasi proporsional.

Dari beberapa penetapan standar akuntansi tersebut dapat dilihat bahwa bukan hanya penerapan dalam praktek yang sulit tetapi pemahaman istilah yang digunakan pun sudah memerlukan penjelasan yang cukup lama. Pelaku UKM tidak cukup memahami secara tepat mengenai standar-standar akuntansi yang ada dalam SAK ETAP dengan hanya melalui sosialisasi saja, tetapi perlu pelatihan dan pendampingan yang kontinu.

### 3. Solusi

Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UKM dalam penyelenggaraan pembukuan dan penggunaan informasi akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis merupakan masalah yang sudah lama terjadi dan perlu segera dicarikan solusinya. Penerbitan SAK oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI adalah salah satu jalan keluar yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. SAK ETAP dibuat lebih sederhana sehingga diharapkan penerapannya tidak menimbulkan kesulitan baru bagi pelaku UKM dalam rangka menyelenggarakan pembukuan yang dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan adanya laporan keuangan yang berkualitas maka diharapkan akan memberikan manfaat penuh (*usefulness*) sehingga dapat berguna sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis oleh banyak pihak (*stakeholders*) yang memerlukan sesuai kepentingan masing-masing.

Meskipun penerbitan SAK ETAP akan menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UKM, tetapi produk ini hanya akan menjadi sia-sia jika pemerintah dan lembaga lain yang terkait (seperti IAI) tidak segera mengambil langkah-langkah praktis dan strategis agar produk ini memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan. Pemerintah dan IAI tidak cukup hanya melakukan sosialisasi saja yang biasanya juga hanya sebagian kecil pelaku UKM saja yang menerimanya, tetapi perlu melakukan pelatihan dan pendampingan secara kontinu. Kreitner and Kinicki (2001) mengungkapkan bahwa ada 4 (empat) tahapan pembentukan persepsi, yaitu :

1. Tahap perhatian selektif. Tahapan ini akan menimbulkan kesadaran betapa pentingnya akuntansi dan informasi.
2. Tahap interpretasi dan penyederhanaan. Tahapan ini merupakan proses interpretasi informasi menjadi representasi mental. Pada tahapan ini akan timbul perbedaan antar individu yang dipengaruhi oleh : perbedaan informasi, pengaruh *mood and emotion*, penerapan kognitif dan perbedaan individu.
3. Tahap penyimpanan dan pengulangan. Pada tahapan ini penerima informasi akan menyimpannya dalam memori yang panjang sehingga mereka akan sadar dan berkeyakinan bahwa informasi akuntansi itu penting bagi usaha yang dijalankan.
4. Tahap penarikan informasi dan pemberian respon. Pada tahap ini pelaku UKM sudah dapat membuat pertimbangan dan kemudian melakukan pengambilan keputusan.

Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Kreitner and Kinicki, maka pemerintah dan lembaga terkait lainnya perlu mengambil langkah-langkah dengan tahapan sebagai berikut :

1. Sosialisasi

Pada tahapan sosialisasi pemerintah dan IAI dapat melibatkan sebanyak mungkin pelaku UKM agar SAK ETAP segera diketahui dan dipahami oleh mereka. Pemerintah dan IAI dapat melibatkan berbagai instansi atau lembaga yang berkompeten dengan bidang akuntansi. Perguruan tinggi, asosiasi dan lembaga swadaya masyarakat merupakan sebagian elemen yang dapat dilibatkan untuk membantu sosialisasi produk ini agar benar-benar sampai ke sebagian besar pelaku UKM.

2. Tahap pelatihan

Pelatihan akan penerapan SAK ETAP perlu dilakukan karena ada kemungkinan pada saat sosialisasi tidak seluruh pelaku UKM paham akan standar-standar yang ada dalam produk ini. Pelatihan akan memberikan tidak saja pemahaman yang lebih mendalam tetapi juga menimbulkan kesadaran akan pentingnya penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Timbulnya kesadaran akan memberikan pemahaman panjang dalam memori sehingga para pelaku UKM secara sadar akan menyelenggarakan pembukuan dan menghasilkan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku serta menggunakannya dalam pengambilan keputusan bisnis.

3. Tahap pendampingan

Pendampingan merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan begitu saja karena dengan keterbatasan sumberdaya yang ada (karyawan bagian akuntansi yang jumlahnya sedikit dan kemampuannya terbatas) dan kurangnya kesadaran akan pentingnya akuntansi tidak cukup diatasi dengan hanya membeirkan sosialisasi dan pelatihan belaka. Pendampingan yang kontinu dalam jangka panjang diharapkan akan memberikan hasil yang lebih baik, tidak hanya kesadaran akan pentingnya akuntansi tetapi juga pemahaman yang lebih mendalam dan ketrampilan yang memadai dalam menyelenggarakan pembukuan untuk usahanya.

Ketiga langkah diatas memang membutuhkan waktu, tenaga dan perhatian serius dari pemerintah dan lembaga terkait. Pemerintah dan IAI tidak dapat mengharapkan hasil dalam jangka pendek, tetapi dengan usaha yang serius dan kontinu diharapkan memberikan hasil yang efektif bagi kemajuan dan perkembangan UKM yang salah satu indikatornya adalah dihasilkannya laporan keuangan yang berkualitas dan cakupan penggunaan informasi akuntansi yang lebih luas sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis bagi para pengguna (stakeholders).

#### **4. Penutup**

Dari uraian yang telah disampaikan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. SAK ETAP merupakan produk DSAK IAI sebagai produk yang terpisah dari SAK Umum. SAK ETAP dikhususkan bagi UKM yang tidak memerlukan

pertanggungjawaban kepada publik. Lahirnya produk ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh UKM dalam penyelenggaraan praktek akuntansi dan penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan bisnis. SAK ETAP dibuat lebih sederhana sehingga diharapkan para pelaku UKM dapat menyusun laporan keuangan yang berkualitas yang dapat memberikan banyak kegunaan bagi para pengguna laporan keuangan UKM.

2. Penerapan SAK ETAP tidak akan mudah dilaksanakan karena banyak kendala yang akan dihadapi oleh pemerintah dan IAI, baik karena kurangnya kesadaran pelaku UKM akan pentingnya akuntansi, kurang memadainya sumberdaya manusia dan kurang seriusnya pemerintah dan instansi terkait dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku UKM. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan tahapan-tahapan sosialisais, pelatihan dan pendampingan agar SAK ETAP memberikan hasil efektif , sehingga laporan keuangan yang dihasilkan oleh UKM menjadi lebih berkualitas dan berguna (*usefulness*).

## Referensi

- Dewan Standar Akuntansi Keuangan – IAI. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik/ Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*. Exposure Draft disampaikan pada Seminar Nasional Implementasi SAK ETAP Dalam Dunia Koperasi dan UKM. Purwokerto, 16 Oktober.
- Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Negara Koperasi dan UKM. 2009. *KUKM Dalam Perspektif Pemerintah*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Implementasi SAK ETAP dalam Dunia Koperasi dan UKM. Purwokerto, 16 Oktober.
- Hariyanto, Eko, dkk. 1999. “Analisis Kebutuhan Informasi Akuntansi Bagi Usaha Perdagangan Eceran di Kotip Purwokerto”. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* Vol. 1 No 1, September.
- Hasan, Norsofina *et al.* 2000. “Factors Influencing The Extent of Usage of Accounting Information By SMEs”. *Accounting Issues : Accounting and Finance*. No 40, p 135-152.
- IAI. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan 2009*. Jakarta : Salemba Empat.
- Kreitner , R and Kinicki, A. 2001. *Organizational Behavior*. Fifth Edition. Boston : Irwin Mc Graw Hill.
- Pinasti, M. 2001. “Penggunaan Informasi Akuntansi Dalam Pengelolaan Usaha Para Pedagang Kecil Di Pasar Tradisional Kabupaten Banyumas”. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*. Vol 3 No 1, Mei.
- Pinasti, M . 2007. “Pengaruh Penyelenggaraan dan Penggunaan Informasi Akuntansi Terhadap Persepsi Pengusaha Kecil Atas Informasi Akuntansi : Suatu Riset Eksperimen”. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol 10 No 3, halaman 321 – 331.
- , 2009. *8 Undang Undang RI 2008*. Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri.

